

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Objek dalam penelitian yang ditetapkan peneliti yaitu *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2010-2018 yang merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan pada waktu pengumpulan data, sesuai dengan anjuran Maimunah (2006) peneliti menggunakan data *time series* (runtut waktu) dengan periode tahun 2010-2018. Serta saran dari Pramuka (2010) yang mengharuskan untuk melakukan suatu penelitian dalam Kabupaten/Kota pada satu Provinsi. Data atas laporan realisasi anggaran APBD yang diperoleh melalui website lembaga pemerintahan DJPK Kementerian Keuangan

Ruang lingkup pada penelitian ini yang digunakan yaitu variabel pendapatan asli daerah yang dibatasi menggunakan total pendapatan asli daerah yang terdapat di laporan anggaran pendapatan belanja daerah, variabel dana alokasi umum dibatasi dengan formula yang didapat dari ringkasan aturan penetapan DAU menurut PP No. 5 Tahun 2005, variabel belanja daerah dibatasi menggunakan total pendapatan asli daerah yang terdapat di laporan anggaran pendapatan belanja daerah.

Alasan penulis memilih Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali karena secara geografis Bali merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dimana dari hasil kekayaan sumber daya tersebut dapat berpotensi sebagai sumber utama penerimaan pendapatan daerah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yaitu mengolah data yang dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah berupa data kuantitatif, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi (*simple regression*) untuk menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2, analisis berganda (*multiple regression*) untuk menguji Hipotesis 3 dan data diolah menggunakan software SPSS.

Kemudian diambil kesimpulan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yang dimana dengan pengujian tersebut terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali yaitu berjumlah 9 Kabupaten/Kota. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil / terbatas.

Penelitian ini menggunakan unit analisis *non-probability sampling* dan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh (sensus), yaitu penentuan sampel menggunakan semua anggota populasi yang berarti sampel dalam penelitian ini adalah 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan rincian 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bali.

Dari populasi tersebut, dalam pengambilan sampel mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Merepresentatifkan keadaan sebenarnya secara keseluruhan pada Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali.
2. Ketersediaan data pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang memiliki informasi keuangan dalam penelitian yang terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah (BD) pada periode tahun 2010-2018.

Berikut ini adalah Tabel III.1 yang menampilkan kabupaten/kota untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel III.1

Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Kab/Kota	No.	Nama Kab/Kota
1	Kabupaten Badung	6	Kabupaten Karangasem
2	Kabupaten Bangli	7	Kabupaten Klungkung
3	Kabupaten Buleleng	8	Kabupaten Tabanan

4	Kabupaten Gianyar	9	Kota Denpasar
5	Kabupaten Jembrana		

Sumber: diolah penulis, 2020

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pada Tabel III.2:

Tabel III.2

Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah populasi dan sampel Laporan Keuangan Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali ditahun 2010-2018	9
2.	Jumlah tahun penelitian	9
Jumlah observasi keseluruhan (9 x 9)		81

Sumber: diolah penulis, 2020

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, terdapat 9 sampel data laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. dengan 9 data laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota yang digunakan sebagai sampel ini memiliki jumlah observasi sebanyak 81 data.

D. Penyusunan Instrumen

Operasional variabel merupakan langkah-langkah untuk mengolah data variabel-variabel yang diteliti. Terdapat dua pengelompokan jenis variabel yaitu variabel terikat (Dependen) dan variabel bebas (Independen). Menurut Hasan

(1999) Variabel dependen adalah variabel yang nilai-nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya sedangkan variabel independen adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD) sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Secara spesifik, variabel-variabel dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis definisi yaitu definisi secara konseptual dan definisi secara operasional.

1. Variabel Dependen

a) Definisi Konseptual

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah adalah sebagai suatu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih untuk menjalankan otonomi daerah.

b) Definisi Operasional

Variabel Belanja Daerah (BD) pada penelitian ini menggunakan jumlah realisasi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Daerah di Provinsi Bali yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2010-2018 menggunakan mata uang satuan Rupiah (Rp) dan pengukuran Belanja Daerah dalam penelitian ini menggunakan Total Belanja Daerah yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI.

Total Belanja Daerah:

$$\mathbf{BD = BO + BM + BTT + BT}$$

Sumber: Halim (2002)

Dengan keterangan:

BD : Belanja Daerah

BO : Belanja Modal

BTT : Belanja Tidak Terduga

BT : Belanja Transfer

2. Variabel Independen

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Definisi Konseptual

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Definisi Operasional

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian ini menggunakan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Provinsi Bali pada Tahun 2010-2018 dengan satuan mata uang

Rupiah (Rp). Pengukuran PAD dalam penelitian ini menggunakan Total PAD yang telah dicantumkan di Laporan Realisasi Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI.

Total PAD:

$$\text{PAD} = \text{Hasil Pajak Daerah} + \text{Hasil Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Hasil Lain-Lain}$$

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

1) Definisi Konseptual

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

2) Definisi Operasional

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) pada penelitian ini menggunakan jumlah realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah di Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2010 hingga 2018 dengan satuan nominal mata uang Rupiah (RP). Pengukuran DAU dalam penelitian ini menggunakan jumlah DAU yang telah dicantumkan di Laporan Realisasi

Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI yang besarnya telah diatur dalam PP No. 55 tahun 2005.

Total DAU:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004

3. Fenomena *Flypaper Effect*

1) Definisi Konseptual

Menurut Iskandar (2012) dikatakan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan asli daerah.

2) Definisi Operasional

Flypaper Effect tidak terdapat penjabaran melalui definisi operasional karena fenomena *Flypaper Effect* adalah situasi yang dihasilkan oleh ketiga variabel diatas. Fenomena ini terjadi jika dalam penelitian ini koefisien beta DAU lebih besar dibandingkan koefisien beta PAD, yang menyatakan bahwa telah terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Adapun ringkasan operasionalisasi variabel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut ini:

Tabel III.3
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengertian	Pengukuran	Skala
Belanja Daerah (BD) Y	kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih untuk menjalankan otonomi daerah. (Permendagri No. 21 Tahun 2011)	Rumus Total BD: $BD = BM + BO + BTT + BT$ (Sumber: Halim, 2002)	Nominal
Pendapatan Asli Daerah (PAD) X ₁	keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No.28 tahun 2009).	Rumus Total PAD: $PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Hasil lain-lain PAD yang sah}$ (Sumber: UU No.28 Th 2009).	Nominal
Dana Alokasi Umum (DAU) X ₂	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan	Besar DAU yang telah tercantum berdasarkan PP No. 55 tahun 2005	Nominal

	antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Pasal 1 tahun 2014).		
--	---	--	--

Sumber: diolah penulis 2020

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data diperlukan yang berkaitan dengan objek penelitian dan data yang digunakan dalam data sekunder. Data sekunder adalah sebuah data yang bersumber dari data yang telah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan sendiri dari peneliti.

Teknik pengumpulan untuk memenuhi data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, dan studi pustaka sebagai alat konfirmasi. Data yang digunakan dalam penelitian adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2018. Sumber data sekunder diambil dari laporan realisasi anggaran APBD yang terdapat di DJPK Kementerian Keuangan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana (*simple regression*) yang bertujuan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan analisis regresi berganda (*multiple regression*) yang bertujuan untuk menganalisis mengenai beberapa

variabel independen (X_1 dan X_2) dengan satu variabel dependen (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala nominal.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam melakukan penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah. Menurut Sujarweni (2016) statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel dan diperoleh dari hasil-hasil sensus, survei atau pengamatan lainnya umumnya masih mentah, acak dan tidak terorganisir dengan baik.

Dalam melakukan analisis statistik ada beberapa langkah pengujian statistik yang harus dilakukan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis regresi linier berganda yang memiliki persyaratan statistik yang harus dipenuhi. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji yang didahulukan untuk dipenuhi. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal,

tidak terdapat multikoloniaritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Jika telah memenuhi asumsi klasik, berarti model regresi ideal (tidak bias) atau (*Best linier unbiased estimator*/BLUE). Untuk itu sebelum melakukan pengujian liner berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik.

2) Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model data yang baik dan layak digunakan memiliki distribusi normal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah uji histogram, uji *probability plot*, uji *skewness kurtosis*, dan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak dalam uji histogram dapat dilihat pada pola distribusi yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri dan ke kanan, tetapi tepat di tengah. Pada uji *probability plot* dapat dilihat dari pola data yang menyebar tepat disekitar garis diagonal dan akan mengikuti arah garis diagonal. Data dapat dikatakan normal dalam uji *skewness kurtosis* jika $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ maka data residual terdistribusi normal dan pada tingkat signifikansi 0,05 nilai Z_{tabel} adalah $\pm 1,96$. Dan apabila besarnya nilai dari Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal.

3) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu

berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk dipakai.

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Apabila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi.

5) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Apabila pola titik pada grafik mempunyai pola yang menyebar maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Selain ini pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan dengan metode uji rank spearman. Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual (nilai eror) dari nilai observasi yang satu dengan observasi yang lain. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji rank spearman dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya terjadi heteroskedastisitas.yaitu dengan menguji tingkat signifikansi. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila hasil uji di atas level signifikan ($p > 0,05$), berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, apabila dibawah level signifikan ($p < 0,05$).

2. Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) yang merupakan pengembangan dari regresi sederhana dimana terdapat lebih dari satu variabel independen. Regresi berganda yang dipakai ini bertujuan untuk memenuhi penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan antara variabel dependen dengan dua variabel independen dari hipotesis yang diajukan.

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel dan juga meneliti seberapa besar pengaruh komponen-komponen variabel independen yaitu PAD dan DAU terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah dan data yang diolah menggunakan bantuan software SPSS. Persamaan dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$BD = a + b_1PAD + b_2DAU + e$$

Keterangan:

BD : Belanja Daerah

a : konstanta

b_1 : koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah

b_2 : koefisien regresi Dana Alokasi Umum

e : *error*

3. Pengujian Hipotesis

Dalam menganalisis pengaruh mengenai *Flypaper Effect* pada PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah juga dilakukan dengan menggunakan Uji Statistik t dan Uji Statistik f. Berikut uraian mengenai uji hipotesis:

a) Uji Statistik T

Pengujian H_1 dan H_2 dilakukan menggunakan Uji statistik t. Metode regresi berganda digunakan untuk menguji H_1 dan H_2 dimana menunjukkan satu variabel bebas berpengaruh signifikan atau tidak terhadap satu variabel terikat.

Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t tabel dengan t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dengan derajat signifikansinya adalah 0,05. Adapun keputusan yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan H_1 dan H_2 dalam uji t yaitu;

1. Apabila $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.
2. Apabila $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, maka variabel independent mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

b) Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya yaitu PAD dan DAU secara simultan terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah atau untuk menguji apakah model regresi yang dibuat signifikan atau tidak signifikan.

Untuk melakukan uji F maka akan dilakukan perbandingan F hitung dengan F tabel, apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sedangkan, apabila $F_{tabel} < F_{hitung}$ H_a diterima yang artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen dan H_0 ditolak yang artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

Pengujian H_3 dapat dilakukan setelah melakukan regresi. Pengujian pertama dilakukan secara simultan melalui uji F yang dimana akan melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas yaitu PAD dan DAU secara bersama-sama

terhadap variabel terikat yaitu BD. Setelah dilakukan Uji f, maka selanjutnya pengujian H_3 dilakukan secara parsial dengan uji t. Uji t pada dasarnya adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel bebas masing-masing berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat secara individual yaitu PAD terhadap BD dan DAU terhadap BD.

Dalam pengambilan keputusan terjadinya fenomena *flypaper effect* dapat dilihat setelah dilakukan pengujian regresi berganda. Terjadinya fenomena *flypaper effect* menurut Venter (2007) yaitu bahwa nilai koefisien beta Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk meneliti dan mengetahui fenomena *flypaper effect* yang terjadi antara hubungan variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK Kemenkeu RI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel dari populasi Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali periode 2010-2018.

Alasan peneliti memilih populasi penelitian ini karena penelitian tentang fenomena *flypaper effect* yang terdapat di Provinsi Bali masih sangat jarang diteliti sehingga peneliti tertarik untuk memilih Provinsi Bali sebagai populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 sampel Kabupaten/Kota dan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga total keseluruhan observasi pada penelitian ini berjumlah 81 sampel.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari data penelitian yang telah di transformasikan dalam bentuk logaritma natural tanpa mengalami seleksi *outlier*. Peneliti mendapatkan informasi mengenai hasil data penelitian yang diperoleh dari hasil data deskripsi tersebut yaitu seperti nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

Tabel IV.1
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BD	81	26.81	29.39	27.8327	.53179
PAD	81	23.51	29.15	26.1569	1.23163
DAU	81	25.61	27.61	26.9527	.37329
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Pada tabel 4.1 menunjukkan hasil pengukuran deskriptif yang berkontribusi terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 81 sampel. Variabel independen yang digunakan terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu belanja daerah.

Adapun penjelasan dari hasil uji statistik deskriptif untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah (BD)

Dari hasil statistik deskriptif diatas, menurut analisis peneliti Tabel IV.1 menunjukkan bahwa *mean* (rata-rata) dari Belanja Daerah tersebut adalah

27.8327 dengan standar deviasi yang dihasilkan sebesar 0.53179. artinya, rata-rata Belanja Daerah yang menjadi sampel penelitian pada tahun 2010-2018 adalah sebesar 27.8327. Pada tabel tersebut juga menunjukkan skor 26.81 yang berarti merupakan jumlah skor minimum pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2010-2018. Skor minimum tersebut terdapat pada Kabupaten Klungkung pada tahun 2010. Sementara itu untuk skor maksimum tersebut yaitu berjumlah 29.39 yang berarti menunjukkan skor maksimal Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Bali tahun 2010-2018 yang terdapat di Kabupaten Badung pada tahun 2018.

Penyebab dari adanya perbedaan antara skor minimum dan maksimum yaitu disebabkan oleh luas wilayah tersebut. Semakin besar luas wilayah daerah tersebut maka mengakibatkan semakin besar pengeluaran Belanja Daerah yang dimiliki. Sebaliknya, semakin kecil luas wilayah tersebut maka semakin kecil pula pengeluaran Belanja Daerah yang dimiliki.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan dari hasil statistik deskriptif diatas, menurut analisis peneliti Tabel IV.1 menunjukkan bahwa *mean* (rata-rata) dari Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah 26.1569 dengan standar deviasi yang dihasilkan sebesar 1.23163. Ini menunjukkan bahwa rata-rata yang menjadi sampel penelitian pada tahun 2010-2018 yaitu sebesar 26.1569. Skor minimum yang terdapat di tabel tersebut adalah sebesar 23.51 yang menunjukkan skor minimal Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Bali pada tahun 2010-

2018. Skor minimum ini terdapat pada Kabupaten Bangli pada tahun 2010. Sedangkan skor maksimal yang terdapat pada tabel tersebut adalah sebesar 29.15 yang menunjukkan jumlah skor maksimal Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Bali pada tahun 2010-2018. Skor maksimal Pendapatan Asli Daerah tersebut terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli pada tahun 2010 adalah Kabupaten yang paling kecil menghasilkan pendapatan asli daerahnya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, hal ini juga berarti masih bergantung pada pemerintah pusat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jumlah skor pendapatan asli daerah yang terbesar adalah kabupaten Badung pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa dengan skor maksimal pada kabupaten Badung, berarti memiliki tingkat kemandirian otonomi daerah yang besar dalam membiayai pertumbuhan daerah.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan dari hasil statistik deskriptif diatas, menurut analisis peneliti Tabel IV.1 menunjukkan bahwa *mean* (rata-rata) dari Dana Alokasi Umum tersebut adalah 26.9527 dengan standar deviasi yang dihasilkan sebesar 0.37329. Ini menunjukkan bahwa rata-rata yang menjadi sampel penelitian pada tahun 2010-2018 yaitu sebesar 26.9527. Skor minimum yang terdapat di tabel tersebut adalah sebesar 25.61 yang mana skor minimum tersebut terjadi

pada Kabupaten Badung pada tahun 2010. Ini membuktikan kabupaten Badung dapat secara mandiri membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan skor maksimum DAU yang diperoleh dari tabel tersebut adalah 27.61 yang mana hasil ini menunjukkan bahwa DAU tertinggi terdapat di kabupaten Buleleng pada tahun 2016 dan hasil ini juga menunjukkan bahwa kabupaten Buleleng masih bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pertumbuhan di daerahnya.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dilkakukan setelah semua data di *input* oleh peneliti. Asumsi klasik terdiri dari beberapa uji yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut adalah beberapa hasil pengujian dari asumsi klasik:

a) Uji Normalitas

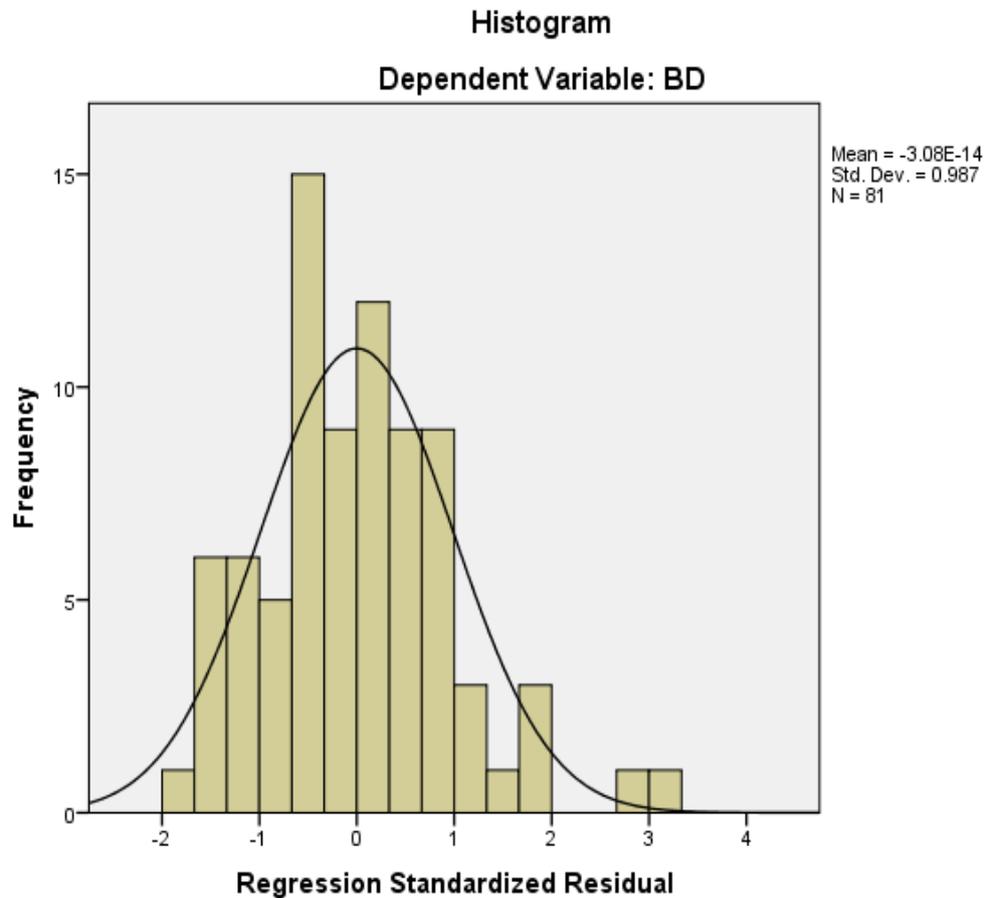
Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, data dari tiap variebel tersebut dapat terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini yang digunakan ada beberapa uji yaitu dengan menggunakan uji histogram, uji *probability plot* dan uji *one-sample kolmogorov-smirnov test*.

1) Uji Histogram

Berdasarkan hasil grafik yang telah diuji pada Gambar IV.1 di bawah bahwa dapat disimpulkan grafik histogram membentuk pola distribusi

seperti lonceng atau pola garis berada tepat di tengah yang artinya data yang dihasilkan telah terdistribusi normal.

Uji Histogram



Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

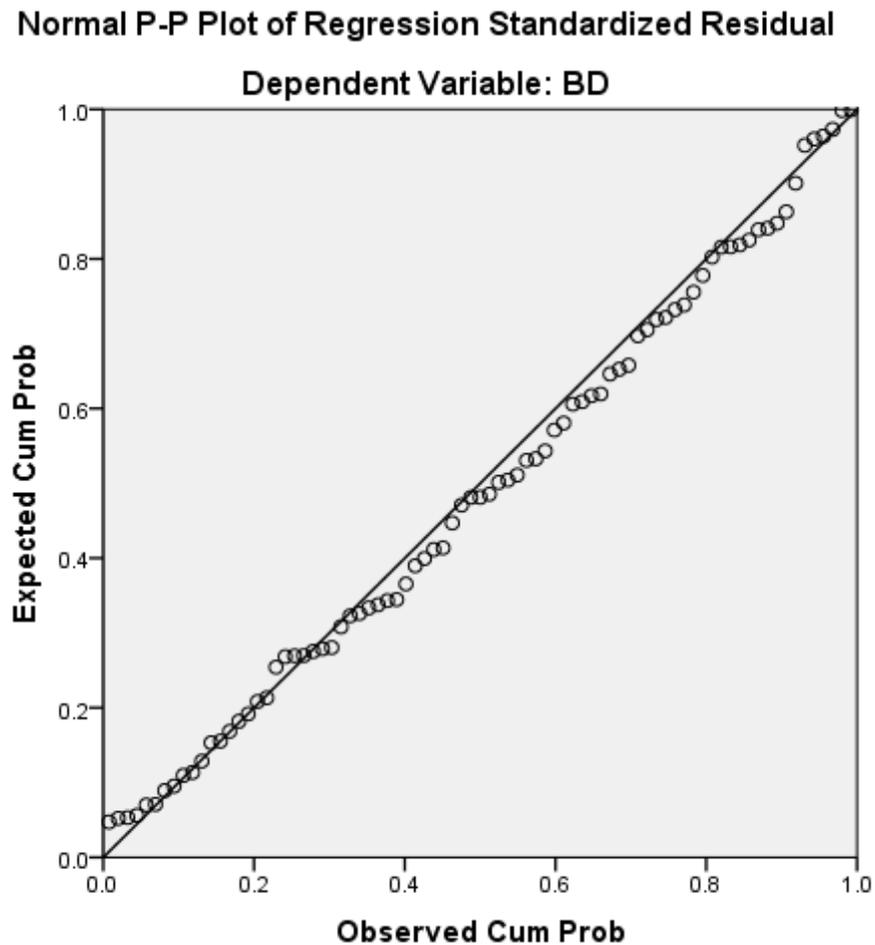
Gambar IV.1

2) Uji *Probability Plot*

Berdasarkan pada gambar IV.2 berikut ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas karena pola penyebaran data yang terdapat pada grafik mengikuti garis diagonal dan

garis yang menggambarkan data penelitian ini mengikuti arah garis diagonal.

Uji Probability Plot



Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Gambar IV.2

3) Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji kolmogorov-smirnov merupakan analisis statistik untuk menguji normalitas. Pengujian uji kolmogrov-smirnov dikarenakan seringkali data

yang secara visual terlihat normal, namun memiliki hasil yang berbeda dengan uji statistik. Oleh karena itu uji normalitas perlu diuji menggunakan uji kolmogorov-smirnov.

Berdasarkan hasil pengujian uji kolmogorov-smirnov yang telah dilakukan peneliti pada tabel IV.2, nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* mencapai angka sebesar 0.2 dengan nilai kolmogorov-smirnov 0.052. Peneliti menyimpulkan bahwa data yang di uji telah terbukti dengan terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi 0.2 yang didapat lebih besar dari 0.05.

Tabel IV.2
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.15867630
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.052
	Negative	-.045
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dan bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi adanya interkorelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen. Model regresi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Dan berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas.

Tabel IV.3
Uji Multikolinearitas Tolerance & VIF

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8.674	1.347		6.440	.000		
	PAD	.399	.015	.924	27.332	.000	1.000	1.000
	DAU	.324	.048	.227	6.728	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Dari hasil uji multikolinearitas diatas pada tabel IV.3 menunjukkan hasil yang dapat dikatakan bahwa semua variabel independen yang di uji tidak terjadi multikolinearitas atau dengan kata lain tidak ada data yang mempunyai kemiripan satu sama lain. Karena tabel IV.3 menunjukkan bahwa nilai VIF kedua variabel independen kurang dari 10 yaitu sebesar 1.000 dan nilai *tolerance* lebih dari 0.10 dengan angka yang didapat sebesar 1.000.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* dengan membandingkan antara angka dari *Durbin-Watson* yang dihasilkan dari pengujian dengan tabel *Durbin-Watson*.

Tabel IV.4
Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.954 ^a	.911	.909	.16070	1.979

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

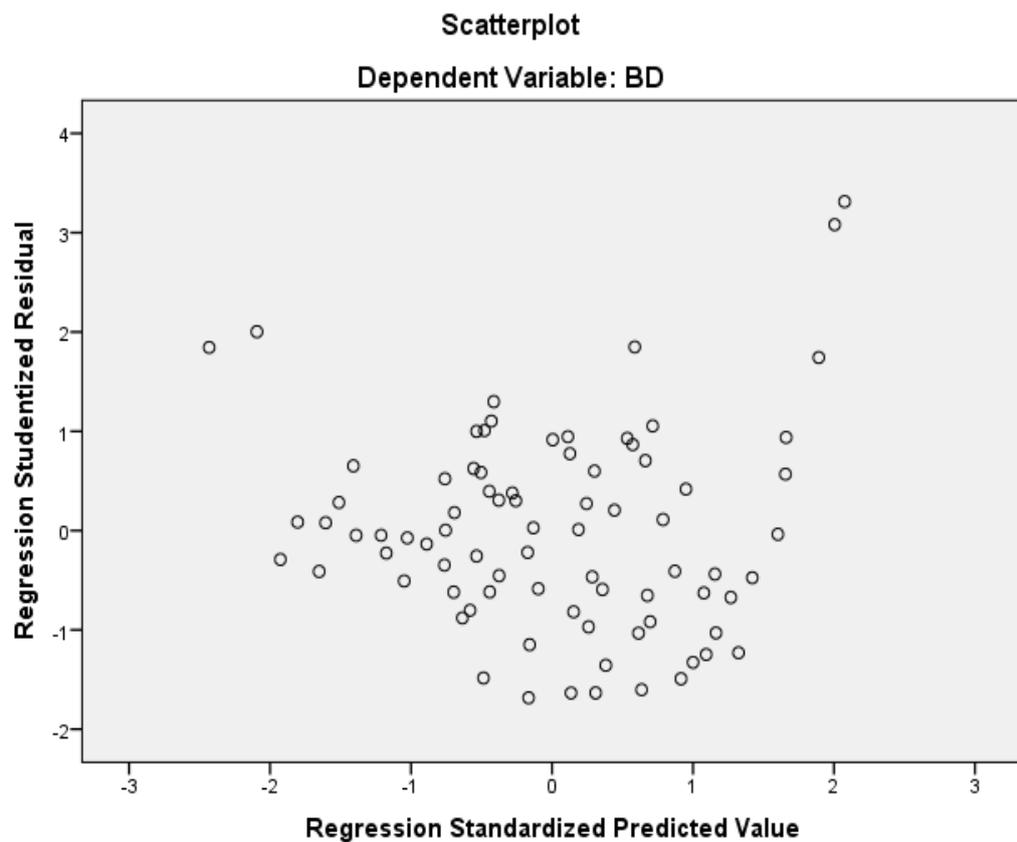
b. Dependent Variable: BD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Berdasarkan tabel IV.4, maka angka *Durbin-Watson* yang dihasilkan yaitu sebesar 1.979. Sedangkan untuk memenuhi kriteria dari hasil uji *Durbin-Watson* tersebut akan dibandingkan dengan tabel *Durbin-Watson*. Angka yang telah diperoleh dalam tabel *Durbin-Watson* yaitu nilai $d_l = 1.5888$, nilai $d_u = 1.6898$ dan nilai $4-d_u = 2.3102$. Sehingga nilai yang didapat dari hasil uji tersebut sesuai kriteria *Durbin-Watson* adalah $1.6898 < 1.979 < 2.3102$ ($d_U < d_W < 4-d_U$) yang berarti d_W (1.979) terletak diantara d_U (1.6898) dan $4-d_U$ (2.3102). Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam uji yang telah dilakukan dengan *Durbin-Watson* tidak terdapat masalah autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual dalam pengamatan heteroskedastisitas atau tidak melalui persamaan model regresi pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mengetahui adanya gejala tersebut maka dapat dilakukan pengamatan model grafik *scatterplot* dan uji *park*. Berikut adalah hasil uji grafik *scatterplot* yang terdapat pada Gambar IV.3

Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Gambar IV.3

Berdasarkan dari hasil grafik uji scatterplot tersebut, maka dapat dilihat bahwa memiliki pola yang tidak beraturan dan menyebar secara acak dimana titik-titik yang terdapat dalam grafik memiliki pola yang menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Adapun uji *rank spearman rho* yang dilakukan peneliti dalam uji heteroskedastisitas. Berikut tabel IV.5 yang memperlihatkan hasil dari uji *rank spearman rho*.

Tabel IV.5
Uji Heteroskedastisitas *Rank Spearman Rho*

			Correlations		
			PAD	DAU	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1.000	.264*	-.189
		Sig. (2-tailed)	.	.017	.092
		N	81	81	81
	DAU	Correlation Coefficient	.264*	1.000	.065
		Sig. (2-tailed)	.017	.	.563
		N	81	81	81
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.189	.065	1.000
		Sig. (2-tailed)	.092	.563	.
		N	81	81	81

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Berdasarkan tabel IV.5 di atas, nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dari variabel PAD sebesar 0,092 yang artinya $0,092 > 0,05$ dan nilai signifikansi dari variabel sebesar 0,563 yang artinya $0,563 > 0,05$. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *rank spearman rho* adalah jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, nilai dari variabel PAD dan DAU nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari semua variabel yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, peneliti telah melakukan uji asumsi klasik dimana uji tersebut telah dilakukan sebelumnya dan telah terbebas dari uji asumsi klasik.

Adapun rumus dari analisis linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{BD = a + b_1PAD + b_2DAU + e}$$

Keterangan

BD : Belanja Daerah

a : konstanta

b_1 : koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah

b_2 : koefisien regresi Dana Alokasi Umum

e : *error*

Kemudian didapatkan hasil dari regresi berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel IV.6
Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.674	1.347		6.440	.000
	PAD	.399	.015	.924	27.332	.000
	DAU	.324	.048	.227	6.728	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Berdasarkan dari tabel IV.6 diatas yang telah didapat, maka dapat diketahui model regresi yang dihasilkan antara PAD dan DAU terhadap BD yaitu:

$$BD = 8,674 + 0,399PAD + 0.324DAU + e$$

Dari persamaan hasil regresi tersebut, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 8,674 yang artinya, jika nilai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum adalah 0, maka Belanja Daerah akan memiliki nilai positif atau surplus sebesar 8,674.

- b. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah menunjukkan angka sebesar 0.399 yang artinya, jika variabel pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1 dan variabel lainnya yang dimiliki tetap, maka nilai dari belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar Rp0,399. Koefisien yang bernilai positif dapat diartikan bahwa terjadinya hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah, dan semakin besar nilai pendapatan asli daerah maka akan semakin meningkatkan nilai belanja daerah.
- c. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum menunjukkan angka sebesar 0.324 yang artinya, jika variabel dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar Rp1 dan variabel lainnya yang dimiliki tetap, maka nilai dari belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar Rp0,324. Koefisien yang bernilai positif dapat diartikan bahwa terjadinya hubungan positif antara dana alokasi umum dengan belanja daerah, dan semakin besar nilai dana alokasi umum maka akan semakin meningkatkan nilai belanja daerah.

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian secara statistik dapat diukur dengan melakukan uji t dan uji f. Berikut ini adalah hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti.

a) Uji Statistik F

Uji F yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel secara simultan atau keseluruhan variabel independen, yaitu:

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap satu variabel dependen yaitu, belanja daerah.

Hipotesis yang telah diuji akan didapatkan hasil melalui perhitungan yang telah ditentukan. Apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sedangkan, apabila $F_{tabel} < F_{hitung}$ H_a diterima yang artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen dan H_0 ditolak yang artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berikut hasil Uji-F pada tabel 4.7:

Tabel IV.7
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.610	2	10.305	399.046	.000 ^b
	Residual	2.014	78	.026		
	Total	22.624	80			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Berdasarkan pada tabel IV.7 diatas, didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 399,046 dengan signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 ($0,000 < 0.05$) dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($399,046 < 3,11$). Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.

b) Uji Statistik T

Uji t dalam penelitian ini yang digunakan bertujuan untuk menguji bagaimanakah pengaruh antara masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri atau secara parsial terhadap variabel terikatnya yang terdapat pada hasil *output* tabel koefisien regresi menggunakan SPSS. Pengukuran dalam uji t ini yaitu melihat perbandingan antara t_{tabel} dengan t_{hitung} . Dan kemudian terbentuklah hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara parsial.

H_a : Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara parsial.

Jika $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau jika $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak dengan derajat kepercayaan 0,05 atau 5%. Untuk mencari nilai t tabel maka dapat dihitung $t_{\text{tabel}} = (t_{\text{tabel}} = (\alpha \div 2 ; n-k-1) = (0,05 \div 2 ; 81-2-1) = (0,025 ; 78)$, dimana α adalah persentase eror, n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel. Dari hasil perhitungan tersebut maka nilai t tabel yang didapat adalah sebesar 1,99085.

Tabel IV.8
Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.674	1.347		6.440	.000
	PAD	.399	.015	.924	27.332	.000
	DAU	.324	.048	.227	6.728	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

1. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah memiliki nilai $t_{tabel} < t_{hitung} = 1.99085 < 27.332$ dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($0.000 < 0.05$). Sehingga hasil tersebut menunjukkan H1 diterima dengan pengaruh terhadap variabel yang diuji. Dengan demikian dapat ditarik pernyataan yang mendasar bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan arah positif. Hal ini mempunyai arti bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula belanja daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang didukung sebelumnya oleh penelitian Iskandar (2012) dan Aliferiana Irsyadea Putri dan Haryanto (2019).

2. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa dana alokasi umum memiliki nilai $t_{tabel} < t_{hitung} = 1.99085 < 6.728$ dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,030 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($0.030 < 0.05$). Sehingga hasil tersebut menunjukkan H1 diterima dengan pengaruh terhadap variabel yang diuji. Dengan demikian dapat ditarik pernyataan yang mendasar bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan arah positif. Hal ini mempunyai arti bahwa semakin besar dana alokasi umum maka semakin besar pula belanja daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang didukung sebelumnya oleh penelitian Adiputra (2014) dan Erickson (2016).

3. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel IV.9 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki nilai t_{hitung} sebesar 27,332 dan 6,728 yang berarti mempunyai nilai yang lebih besar dari t_{tabel} dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($0.000 < 0.05$). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka akan semakin besar pula belanja daerah dan menunjukkan tidak terjadinya *flypaper effect*.

Hasil dari pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan dan nilai koefisien beta pendapatan asli daerah lebih besar dari dana alokasi umum yaitu $0.399 > 0.324$ dan keduanya signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadinya fenomena *flypaper effect* karena tidak sesuai dengan syarat terjadinya *flypaper effect* yaitu nilai koefisien beta dana alokasi umum lebih besar dari pendapatan asli daerah ($DAU > PAD$). Dengan demikian hipotesis 3 menyatakan bahwa pengaruh koefisien beta pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh koefisien beta dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang didukung sebelumnya oleh penelitian Adiputra (2014) dan Iskandar (2012).

F. Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah maka terdapat hasil yang telah diteliti. Dari pengujian ini memberikan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dan tidak terjadinya fenomena *flypaper effect* yang ditemukan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Adapun pembahasan dari hasil uji yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber untuk pengeluaran daerah salah satunya yaitu Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya sesuai kebijakan otonomi daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Dalam teori keagenan juga tersirat di dalam hubungan pemerintah daerah yaitu dengan masyarakat. Masyarakat (principal) berkewajiban memberikan sumber daya kepada daerah yaitu berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah (agen) dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada

masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, sarana umum dan infrastruktur yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Pendapatan asli daerah merupakan bagian yang berperan sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dan kemampuan daerah melaksanakan keuangan diukur dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila dalam suatu daerah jumlah pendapatan asli daerah terus meningkat dengan diimbangi pengeluaran daerah yang efisien maka dapat dikatakan daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki akan semakin mandiri daerah tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan semakin kecil pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini hasil dari hipotesis 1 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah diterima. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah semakin besar pula belanja daerah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun penulis bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka akan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga konsisten sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu penelitian Iskandar (2012) dan Aliferiana Irsyadea Putri dan Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula belanja daerah. Hal ini disebabkan karena

pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil kegiatan pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan dipungut berdasarkan peraturan yang telah berlaku. Dengan demikian berkaitan dengan hal tersebut, semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki maka akan semakin besar pula dana pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dalam mendanai kegiatan atau program yang telah direncanakan pemerintah. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan kecenderungan pemerintah akan menghabiskan dana anggaran yang sudah ditetapkan untuk lebih menggali potensi yang dimiliki.

Sesuai dengan pengujian statistik deskriptif yang dilakukan dengan transformasi data logaritma natural, bahwa pendapatan asli daerah tertinggi sebesar 29.15 dan pendapatan asli daerah terendah sebesar 23.5. Sehingga apabila merujuk pada data Tabel I.2 maka pendapatan asli daerah terbesar diperoleh oleh Kabupaten Badung sebesar Rp. 4.555.716.000.000,00 pada tahun 2018 dan pendapatan asli daerah terendah sebesar Rp. 16.253.000.000,00 pada tahun 2010.

Selain itu pada Tabel I.2 Kabupaten Badung juga termasuk memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi dari tahun 2010-2018. Hal ini dikarenakan Kabupaten Badung merupakan daerah yang secara geografis terletak di bagian Selatan Pulau Bali yang banyak menyuguhkan keindahan alam pada sektor pariwisata. Oleh karenanya, daerah Badung sangat potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran yaitu sebesar 70%. Selain itu Kabupaten Badung juga menjadi kawasan pertemuan

internasional sehingga mengundang para investor untuk menanamkan saham terutama sejak tahun 2013 pertumbuhan ekonomi terus meningkat hingga mencapai 7,30%.

Sedangkan untuk Kabupaten Bangli pada Tabel I.2 Kabupaten Bangli memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah dari tahun 2010-2018. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya pemerintah dalam membangun dan mengembangkan daerah Bangli dan Kabupaten Bangli merupakan kabupaten tidak padat penduduk. Selain itu Kabupaten Bangli juga hanya bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil dan perdagangan saja. Selain itu Kabupaten Bangli juga memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yaitu sebesar 6,9. Di sisi lain penggunaan dari Belanja Daerah di Provinsi Bali hanya berkisar 10% untuk belanja sejenis investasi. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk belanja pembangunan masih terbilang cukup rendah.

Pada Gambar 1.1 ringkasan APBD provinsi bali tahun 2010-2018 menunjukkan bahwa pendapatan yang terdapat di provinsi Bali terus mengalami peningkatan seiring dengan belanja yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komposisi pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Gambar 1.3 yang menunjukkan bahwa trend pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan belanja daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk pengalokasian dana dengan maksud pemerataan keuangan daerah sesuai kebutuhan yang dimiliki tiap masing-masing daerah.

Teori keagenan dalam sebuah riset penganggaran publik yang dimana merupakan contoh penerapan hubungan pendelegasian antara pemerintah pusat (principal) dan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya berupa kekayaan sumber daya daerah yang dimiliki dalam kerangka desentralisasi dan sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah daerah. Untuk mengelola sumber daya daerah yang dimiliki, maka pemerintah daerah membutuhkan dana anggaran dari pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya potensial dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum. Dalam mengelola keuangan daerahnya, pemerintah daerah menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai belanja untuk pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang laju perekonomian di daerah. Apabila dalam transfer dana dari pemerintah pusat tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan daerahnya, maka daerah tersebut akan sulit untuk melakukan pembangunan di daerahnya untuk berkembang. Dan jika transfer dana dari pemerintah pusat tinggi, maka pemerintah daerah akan menggunakannya untuk membelanjakan

kebutuhan daerah dan semakin meningkatkan pembangunan pada daerah tersebut.

Selain itu dana alokasi umum juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan celah fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Karena jika pemerintah daerah ingin membelanjakan dana untuk kebutuhan daerah dan melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah butuh sumber dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran tersebut, apabila pada daerah yang mempunyai pendapatan yang kecil daerah tersebut akan sangat sulit membiayai kebutuhannya tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah membutuhkan dana suntikan dari pemerintah pusat untuk membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhannya agar tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian ini hasil dari hipotesis 2 menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah diterima. Artinya dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana alokasi umum akan semakin besar pula belanja daerah.

Sesuai dengan pengujian statistik deskriptif yang dilakukan dengan transformasi data logaritma natural, bahwa dana alokasi umum tertinggi sebesar 27.61 dan dana alokasi umum terendah sebesar 25.61. Sehingga apabila merujuk pada data Tabel I.3 maka pendapatan asli daerah tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 982.698.000.000,00 pada tahun 2016 dan dana

alokasi umum terendah sebesar Rp. 131.919.568.000,00 pada tahun 2010 di Kabupaten Badung.

Pada Tabel I.3, Kabupaten Buleleng memiliki dana alokasi umum tertinggi dalam kurun waktu 2010-2018 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Karena Kabupaten Buleleng mempunyai kapasitas fiskal rendah dan kebutuhan fiskalnya relatif besar. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang didominasi oleh sektor pertanian karena secara geografis Buleleng terletak di Utara Pulau Bali yang berbatasan dengan Laut Jawa dan Buleleng juga terkenal dengan penghasil pertanian terbesar di Pulau Bali yaitu penghasil dari produksi salak Bali dan keprok Tejakula. Sebesar hampir 30% pendapatan per kapita masyarakat Buleleng didominasi oleh pertanian dan tenaga kerja sebagian besar yang terserap dari sektor pertanian sebesar 40%. Disamping itu, dana alokasi umum yang besar juga diiringi oleh belanja daerah yang besar pula. Karena kabupaten Buleleng menggunakan dana tersebut dengan kebutuhan di daerahnya. Dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang kesehatan dan pembangunan pendidikan. Selain itu, Kabupaten Buleleng juga memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan kabupaten Buleleng yaitu dengan menggunakannya untuk melaksanakan program dana kelurahan karena sebelumnya kelurahan yang selama ini tidak mendapatkan dana alokasi umum, tahun berikutnya diberikan dana alokasi umum tambahan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kategori daerah.

Pada Tabel I.3, Kabupaten Badung memperoleh dana alokasi umum tertinggi dalam kurun waktu 2010-2018 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Karena Kabupaten Badung mempunyai kapasitas fiskal tinggi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya. Tingginya rasio pajak daerah Badung berasal dari sektor pariwisata, seperti pajak hotel dan restoran. Hal ini juga bisa terjadi karena dana alokasi umum cenderung digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan penulis menyatakan bahwa semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh maka akan berpengaruh terhadap belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil yang telah diteliti dari penelitian ini sejalan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra (2014) dan Erikson (2016) yang menyatakan semakin besar dana alokasi umum maka akan semakin besar pula belanja daerah.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini, terdapat kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan dana alokasi umum sebagai anggaran yang akan dipakai dengan menggali potensi-potensi daerahnya dengan harapan daerah tersebut agar menjadi daerah yang secara mandiri menggunakan potensinya secara efektif dan tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membangun dan mengelola daerahnya.

3. *Flypaper Effect* pada pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana

transfer atau dari pada pendapatan asli dari daerahnya tersebut. *Flypaper effect* terjadi jika pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

Dalam teori keagenan, *flypaper effect* terdapat pada konflik kepentingan yang terjadi dan menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Konflik kepentingan dalam pemerintahan dilihat dari perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat (principal) dan pemerintah daerah (agen) yang dalam hal ini pemerintah pusat menginginkan agar penggunaan dana alokasi umum dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai Belanja Daerah dan mengharapkan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai kebijakan desentralisasi. Sebaliknya, pemerintah daerah menginginkan agar transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat lebih tinggi ditahun berikutnya sehingga yang terjadi pemerintah daerah meminimalisir penggunaan pendapatan asli daerah untuk belanja daerah dan lebih menggunakan dana alokasi umum untuk belanja daerahnya.

Selain itu penyebab dari hal ini juga disebabkan oleh faktor dari kebijakan atas pemberian dana alokasi umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada kemampuan fiskal masing-masing daerah yaitu daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah yang akan memperoleh jumlah dana alokasi umum yang cukup besar, sebaliknya daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang tinggi akan memperoleh jumlah dana alokasi umum yang relatif kecil. Selain itu dengan kemampuan fiskal yang rendah pemerintah daerah secara mandiri belum bisa membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dan

untuk mendukung perkembangannya, pemerintah daerah membutuhkan dana alokasi umum yang berupa bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka akan semakin besar pula belanja daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan alokasi umum secara simultan dan parsial mempengaruhi belanja daerah. Selain itu terdapat peningkatan pendapatan asli daerah dan alokasi umum yang akan memberikan pengaruh terhadap belanja daerah. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam hal ini pendapatan asli daerah memiliki kecenderungan dominan dalam membiayai belanja daerah.

Berdasarkan hasil yang didapat dari pengujian regresi linear berganda pada tabel IV.6 telah membuktikan bahwa tidak terjadinya fenomena *flypaper effect* dikarenakan sesuai syarat terjadinya *flypaper effect* yaitu apabila koefisien beta dana alokasi umum lebih besar daripada koefisien beta pendapatan asli daerah ($DAU > PAD$) dan keduanya signifikan. Namun pada penelitian ini menyatakan bahwa koefisien beta pendapatan asli daerah lebih besar dari pada dana alokasi umum ($PAD > DAU$) yang berarti tidak terjadi fenomena *flypaper effect*. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis 3 yang telah dirumuskan dimana telah terjadi fenomena *flypaper effect*.

Hasil dari penelitian ini memberikan pembuktian bahwa semakin besar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka akan semakin besar pula belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 bahwa peningkatan belanja daerah diiringi dengan besarnya jumlah pendapatan

daerah pada tahun 2010-2018. Pada tahun 2010-2015 terlihat jumlah pendapatan daerah mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah dan telah terjadi surplus pada tahun tersebut yang berarti kelebihan anggaran pendapatan daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan anggaran belanja daerah. Pada Gambar I.2, pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan belanja daerah, yang berarti jika semakin meningkatnya pendapatan daerah, maka akan semakin meningkatkan belanja daerah. Sedangkan untuk dana alokasi umum mengalami peningkatan pada tahun 2010-2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017, lalu dana alokasi umum mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018. Namun hal ini bertolak belakang dengan fakta yang ditunjukkan pada Gambar I.3 bahwa belanja daerah didominasi oleh dana alokasi umum sebesar 51% sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar 49%, dalam hal ini dana alokasi umum memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah. Pada Gambar I.3 menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengandalkan dana alokasi umum untuk membelanjakan belanja daerahnya dibandingkan pendapatan asli daerah atau dengan kata lain belum secara mandiri daerah tersebut untuk menggunakan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan yang dimiliki dari daerahnya. Penyebab dari ketidaksesuaian dari data tersebut pada Gambar I.3 adalah karena data tersebut hanya mewakili data dari jumlah total keseluruhan PAD dan DAU tiap tahun di Provinsi Bali dan hanya menguji data secara keseluruhan di Provinsi Bali. Dimana seharusnya pengujian dilakukan dengan menguji tiap Kabupaten/Kota per tahunnya untuk melihat daerah mana

saja yang terjadi fenomena *flypaper effect* dan melihat fenomena *flypaper effect* dari daerah yang kaya dan miskin atau dengan pendapatan asli daerah yang tertinggi dan terendah sehingga pengujian fenomena *flypaper effect* dapat secara spesifik menjelaskan fakta tersebut. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Pradana Adiputra (2014) dan Irham Iskandar (2012) yang menyatakan tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Dengan demikian, fenomena *flypaper effect* ini dapat dikatakan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, pemerintah di Provinsi Bali telah mandiri dalam segi keuangannya karena telah mampu bertumpu pada sumber-sumber dan potensi yang dimiliki dalam menjalankan roda pemerintahan. Potensi yang dimiliki daerah Bali juga cukup besar dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Dan posisi yang strategis serta kaya akan sumber daya alam yang menjanjikan sumber-sumber penerimaan yang besar seperti pajak dan retribusi daerah maupun pemanfaatan sumber daya alam dari sektor wisata dan pertanian yang paling mendominasi akan penerimaan yang diperoleh.